

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

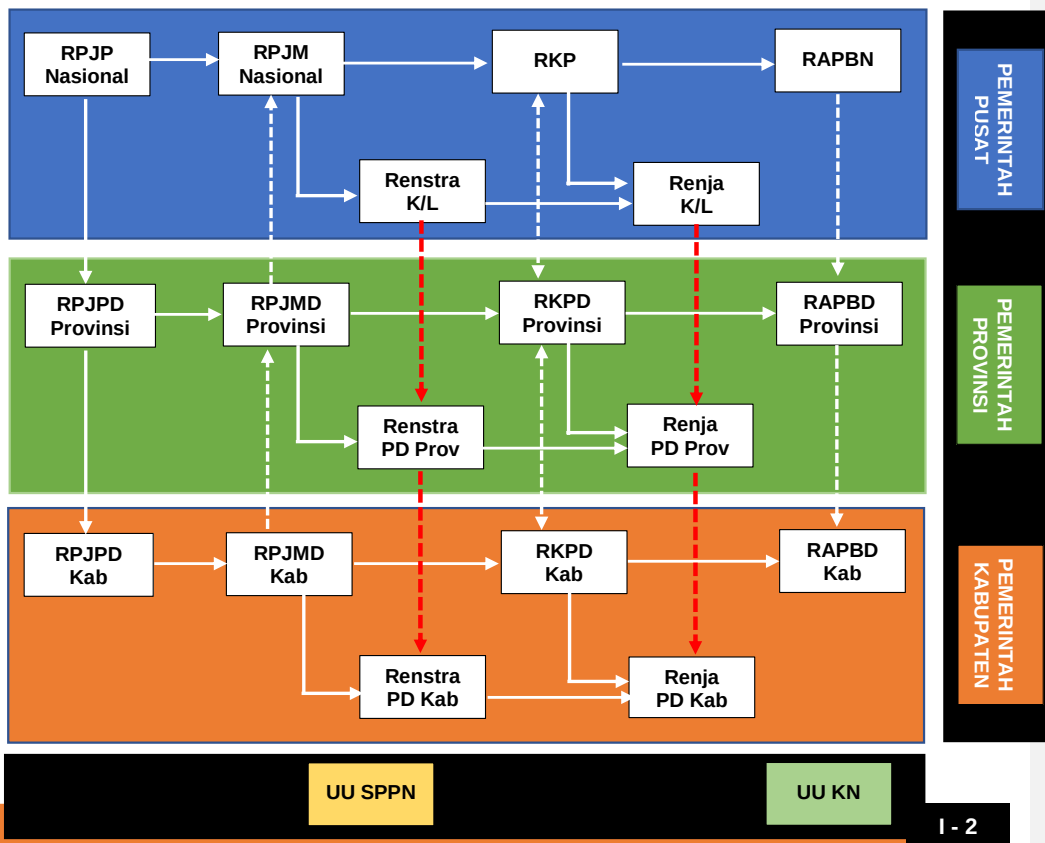
Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat yang secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan Perangkat Daerah penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dinamakan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD dan RPJMD, RPJMD Provinsi, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah juga memperhatikan Renstra K/L, Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1.

**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan**



Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021–2026. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten pemalang terkait dengan pencapaian misi kelima dari RPJMD yaitu **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Pada Potensi Lokal**. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. Dengan Program Unggulan yaitu DEWI = Desa Wisata dan KOIN= Kota Industri). Indikator sasaran RPJMD dari misi kelima ini adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Dengan ditetapkannya sasaran RPJMD ini maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang selama tahun 2021-2026. Renstra ini selanjutnya dapat dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja OPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pematang 2021-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
 23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

24. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga –Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang –Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor xxx);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi – Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xxx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor xxx Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xxx);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);

Comment [WU1]: Sesuaikan dengan landasan hukum di SK, perda 14/2020

Comment [WU2]: Sesuaikan dengan perda terbaru, menunggu..

39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;
40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;
41. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 75)
42. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelelangan Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 76)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada bidang perikanan untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2021-2026
2. Teridentifikasinya program/kegiatan dan indikator kinerja program/kegiatan tahunan bagi perencanaan operasional yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
3. Tersusunnya tolok ukur kinerja yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang selama periode 2021-2026

4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar fungsi OPD maupun antara Pusat dan Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disajikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan
- 2.2. Sumberdaya Dinas Perikanan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
- 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan pelayanan Dinas Perikanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaah Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2016 tentang kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Sub Urusan Perikanan Tangkap yaitu :
 - 1) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;
 - 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
- b. Sub Urusan Perikanan Budidaya yaitu :
 - 1) Penerbitan Ijin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;
 - 2) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - 3) Pengelolaan pembudidayaan ikan

Dalam menyelenggarakan Tugas Fungsi Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang dibebankan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang merupakan penunjang unsur pemerintahan Kabupaten di bidang Perikanan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat. Secara terperinci tugas dan fungsi tersebut dikelompokkan menjadi :

- a. Kepala Dinas
 1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang perikanan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 2. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang perikanan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
 3. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang perikanan sesuai dengan program dan kegiatan bidang perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

4. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perikanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
 5. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang perikanan berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
 6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang perikanan sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik.
 7. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perikanan sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,
 8. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang perikanan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
 9. Merumuskan laporan di bidang perikanan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
 10. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang perikanan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja, dan
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi
- b. Sekretaris
1. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
 2. mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang perikanan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,

3. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 4. Menyelenggarakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
 5. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
 6. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
 7. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perikanan sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
 8. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang perikanan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
 9. Mengkoordinasikan konsep inovasi, penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang perikanan dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
 10. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
 11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
 2. Menyusun rancangan kebijakan produksi dan pengawasan penangkapan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 3. Menyusun rancangan kebijakan Sarana dan Prasarana Penangkapan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 4. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan sesuai dengan pedoman pelaksanaan agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
 5. Menyelenggarakan pengelolaan perikanan tangkap di perairan umum daratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar sumberdaya ikan tetap lestari,
 6. Menyusun konsep inovasi Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
 7. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi di Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
 8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
 9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan
1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,

2. Menyusun rancangan kebijakan produksi, pembenihan dan pengendalian sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 3. Menyusun rancangan kebijakan sarana dan prasarana budidaya sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 4. Menyelenggarakan program dan kegiatan bidang pengelolaan budidaya ikan sesuai dengan pedoman pelaksanaan agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
 5. Menyusun konsep inovasi Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
 6. Mengoordinasikan tugas seksi di Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
 8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi
- e. Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran
1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Bina Usaha dan Pemasaran sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
 2. Menyusun rancangan kebijakan bimbingan usaha dan pemasaran sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 3. Menyusun rancangan kebijakan pembinaan teknologi dan pengolahan mutu hasil sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 4. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Bina Usaha dan Pemasaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,

5. Menyusun konsep inovasi Bidang Bina Usaha dan Pemasaran berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
6. Mengoordinasikan tugas seksi di Bidang Bina Usaha dan Pemasaran guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Usaha dan Pemasaran sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha dan Pemasaran secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

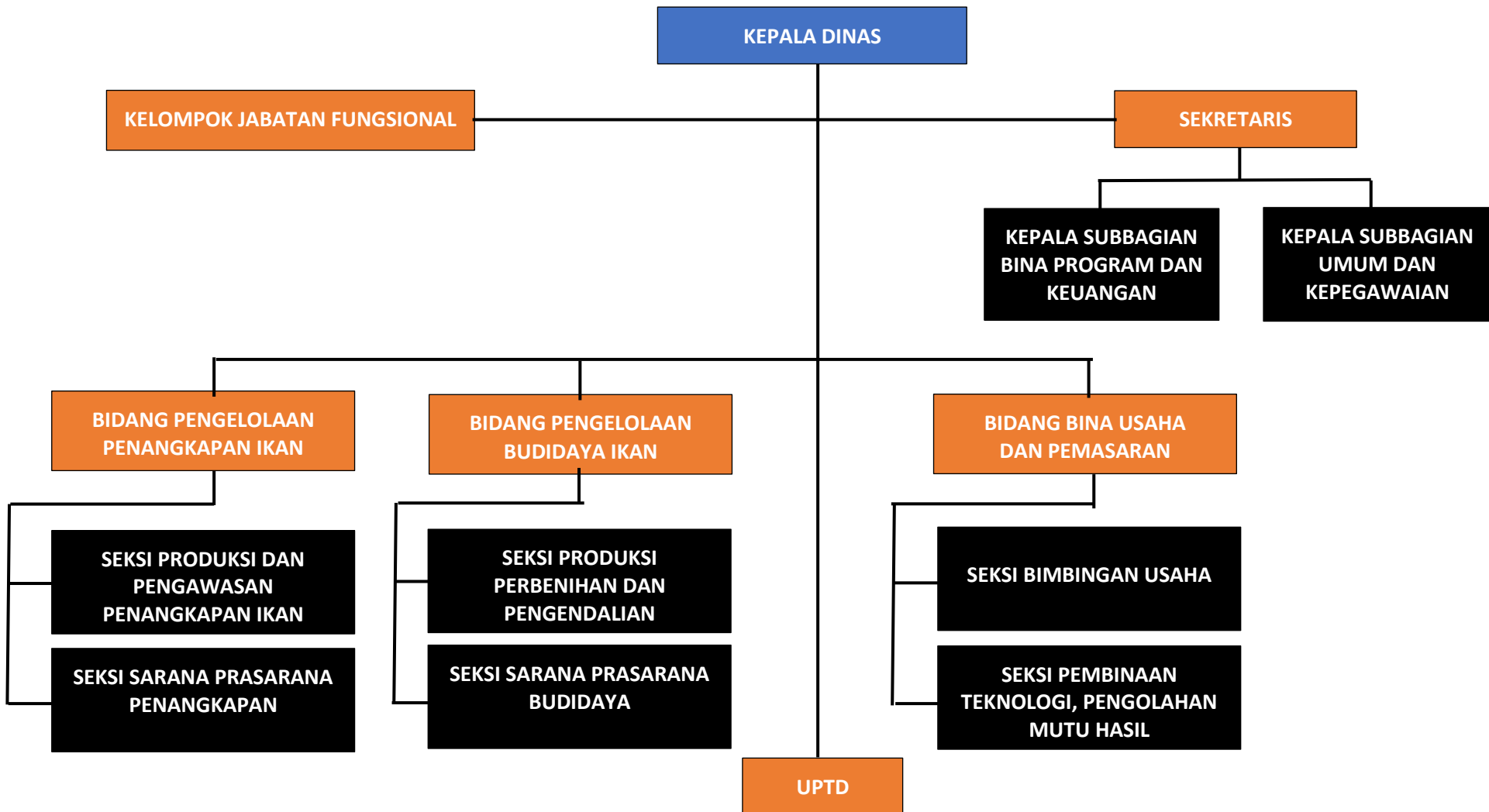
2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Bina Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi dan Pengawasan Penangkapan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
- d. Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi, Pembenihan dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
- e. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bimbingan Usaha dan Pemasaan
 - 2) Seksi Pembinaan Teknologi, Pengolahan Mutu Hasil.
- f. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi



2.2. SUMBERDAYA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang berperan penting atas keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perikanan. Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang didukung oleh sejumlah personil atau pegawai sebanyak 71 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 38 dan Non ASN sebanyak 33 dengan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Sumberdaya Manusia Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

No	Keterangan	Jumlah
A	ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
1	Pasca Sarjana	9
2	Sarjana	13
3	Diploma	4
4	SMA	9
5	SMP	2
6	SD	1
	Jumlah	38
B	ASN Berdasarkan Golongan	
1	ASN Gol. IV	5
2	ASN Gol. III	21
3	ASN Gol. II	12
4	ASN Gol. I	0
	Jumlah	38
C	Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
1	Pasca Sarjana	0
2	Sarjana	19
3	Diploma	6
4	SMA	7
5	SMP	0
6	SD	1

	Jumlah	33
No	Keterangan	Jumlah
D	Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin	
1	Laki-laki	46
2	Perempuan	25
	Jumlah	71

2.2.2. Sarana Prasarana

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang memiliki aset tidak bergerak dan bergerak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.
Daftar Barang Inventaris

No.	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah	No.	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1	Tambak	m2	3	63	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Set	9
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	m2	1	64	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Set	2
3	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan ikan	m2	2	65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Set	14
4	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	m2	3	66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Set	1
5	Portable Generating Set	Unit	1	67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Set	45
6	Station Wagon	Unit	7	68	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Set	11
7	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	Unit	1	69	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	Set	1
8	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Unit	1	70	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	Set	2
9	Mobil Unit Pameran	Unit	2	71	Lemari Buku untuk Perpustakaan	Buah	2
10	Sepeda Motor	Unit	43	72	Buffet Kayu	Buah	1
11	Perkakas Standar Lain-lain	Unit	1	73	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	Buah	8
12	Perkakas Khusus Lain-lain	Unit	1	74	Camera + Attachment	Unit	9
13	Air Conditioning Unit	Unit	2	75	Proyektor + Attachment	Unit	7
14	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	Unit	6	76	Microphone/Wireless Mic	Unit	7
15	Alat Pengukur PH Tanah (Soil tester)	Unit	1	77	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Unit	5
16	Alat Laboratorium Lain-lain	Unit	2	78	Peralatan studio Visual Lain-lain	Unit	8
17	Lemari Besi	Buah	4	79	Camera Electronic	Unit	8
18	Rak Besi/Metal	Buah	3	80	Pesawat Telephone	Unit	1
19	Rak Kayu	Buah	10	81	Alat-alat sandi lain-lain	Unit	1
20	Filling Besi/Metal	Buah	17	82	Video Camera dan Recorder	Unit	2

21	Lemari Kaca	Buah	2	83	Utarine Scoope With Burts 24 cm ss	Unit	1
No.	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah	No.	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah
22	Lemari Kayu	Buah	5	84	Mass Chest Unit	Unit	1
23	Alat Penghancur Kertas	Buah	4	85	PH Meter	Unit	4
24	Papan Pengumuman	Buah	1	86	Refractometer	Unit	7
25	Papan Tulis	Buah	1	87	System Pengendali Derajat Asam	Unit	2
26	Mesin Absensi	Unit	3	88	Freezer	Unit	2
27	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Buah	8	89	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	1
28	Tiang Microphone	Buah	2	90	DO Meter	Unit	2
29	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Buah	2	91	Salino Meter	Unit	5
30	Meja Rapat	Set	13	92	Test Kit	Unit	3
31	Meja Tulis	Set	2	93	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah lain-lain	Unit	1
32	Meja Podium	Set	1	94	Bangunan Gedung Kantor Permanen	m2	6
33	Meja Resepion	Set	1	95	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	m2	3
34	Kursi Putar	Set	1	96	Bangunan Gudang Tertutup permanen	m2	2
35	Kursi Biasa	Set	5	97	Bangunan Gudang Terbuka permanen	m2	1
36	Kursi Lipat	Set	18	98	Bangunan Gudang Lain-lain	m2	14
37	Meja Komputer	Set	4	99	Bangunan Gedung Laboratorium permanen	m2	1
38	Meja Biro	Set	27	100	Bangunan Gedung Tempat pertemuan permanen	m2	1
39	Lemari Es	Buah	2	101	Bangunan Kamar Mandi	m2	1
40	AC Unit	Unit	1	102	Bangunan Gedung Pertokoan lain-lain	m2	6
41	AC Split	Unit	16	103	Bangunan Gedung Garasi/Pool lain-lain	m2	1
42	Kompor Gas	Buah	1	104	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen	m2	1
43	Televisi	Buah	3	105	Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya permanen	m2	13
44	Sound System	Unit	2	106	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	m2	5
45	Camera Film	Unit	1	108	Bangunan Pagar Keliling	m2	1
46	Aquarium	Buah	2	109	Bangunan Gerbang Permanen	m2	4
47	Tangga Alumunium	Buah	1	110	Tugu Peringatan Lainnya	m2	3
48	Dispenser	Buah	3	111	Jalan Kabupaten Strategis Kabupaten	m2	1
49	Handy Cam	Unit	3	112	Jalan Khusus Lain-lain	m2	1
50	Alat Rumah Tangga Lain- lain	Buah	9	113	Jembatan Penyeberangan Orang	m2	1
51	Alat Pemadam Portable	Buah	3	114	Saluran Tertier Pembuang	m2	1

52	PC Unit	Unit	17	115	Bangunan Pembuang Irigasi Lain-lain	m2	1
53	Laptop	Unit	31	116	Saluran Drainase	m2	1
No.	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah	No.	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah
54	Notebook	Unit	10	117	Dermaga lain lain	m2	1
55	Personal Komputer Lain-Lain	Unit	2	118	Penampungan Air Hujan (PAM)	m2	2
56	Printer	Unit	25	119	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	m2	1
57	Scanner	Unit	3	120	Instalasi Gardu Listrik Distribusi lain-lain	m2	1
58	Monitor	Unit	1	121	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	m2	1
59	External	Unit	5	122	Jaringan Telepon Di atas Tanah lain-lain	m2	1
60	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	Unit	1	123	Buku Umum Lain-lain	Buah	35
61	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Set	1	124	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Buah	414
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Set	11	125	Pahatan Lain-lain	Buah	1

2.3. KINERJA PELAYANAN

2.3.1. Produksi Perikanan

Selama periode 5 tahun terakhir, realisasi produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya telah melebihi target yang direncanakan dengan kinerja produksi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana antara target dan realisasi produksinya mencapai 173,76% untuk perikanan tangkap dan 106,42% untuk perikanan budidaya. Meskipun realisasi produksi telah melebihi targetnya namun apabila dicermati lebih jauh secara umum, produksi perikanan tangkap cenderung mengalami penurunan dalam periode 5 tahun terakhir yaitu menurun sebesar 35,10%. Berbeda halnya dengan produksi perikanan budidaya yang cenderung mengalami peningkatan dalam periode 5 tahun terakhir yaitu sebesar 27,86%.

Target dan realisasi produksi perikanan di Kabupaten Pemalang selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Target dan Realisasi Produksi Perikanan

Indikator	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Produksi perikanan tangkap	15.573.552	27.092.348	15.885.023	26.511.707	16.202.724	21.890.350	16.526.778	16.973.640	16.857.314	17.591.174
Rasio capaian	173,96%		166,90%		135,10%		102,70%		104,35%	
Produksi perikanan budidaya	13.081.112	13.921.419	14.459.000	14.642.375	15.529.000	15.714.500	16.698.000	16.918.064	17.638.000	17.800.168
Rasio capaian	106,42%		101,27%		101,19%		101,31%		100,92%	

2.3.2. Sarana Prasarana Perikanan

Untuk memperlancar kegiatan pemasaran produk perikanan, di Kabupaten Pemalang saat ini terdapat 6 unit Tempat Pelelangan Ikan dengan jumlah TPI yang masih beroperasi sebanyak 5 unit. Jumlah kapal yang dilayani adalah sebanyak 3.330 unit kapal dan jumlah bakul yang bertransaksi di TPI adalah sebanyak 357 orang, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.
Sarana Prasarana Perikanan

Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Bakul	Kapal	
		Jumlah	Ukuran
TPI Nyamplungsari	42	114	1-5 GT
TPI Tanjungsari	52	801	1-5 GT
		171	6-10GT
		52	10-30 GT
TPI Mojo	66	468	1-5 GT
TPI Asemboyong	160	818	1-5 GT
		533	6-10GT
		65	10-30 GT
TPI Ketapang	37	271	1-5 GT
TPI Tasikrejo	0	26	1-5 GT
Total	357	3.330	

2.3.3. Pembinaan Kelompok Masyarakat

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang selama 5 tahun terakhir telah melakukan pembinaan kepada masyarakat pesisir, kelompok pembudidaya ikan, dan kelompok nelayan. Jumlah kelompok yang dibina selama 5 tahun terakhir telah mengalami peningkatan dan telah melebihi target yang direncanakan. Capaian kinerja pembinaan kelompok masyarakat selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.
Pembinaan Kelompok Masyarakat

Indikator	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Cakupan bina masyarakat pesisir	265	270	270	275	275	276	280	281	285	286
Cakupan kelompok pembudidaya ikan yang dibina	115	115	120	120	125	127	130	130	135	135
Cakupan kelompok bina nelayan	63	64	65	66	67	69	69	73	71	75
Cakupan bina masyarakat pesisir	375	375	425	475	475	480	525	530	575	580

2.3.4. Kesejahteraan Masyarakat dan Nelayan

Dalam hal capaian kinerja peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang dalam sektor kelautan dan perikanan dapat dilihat dari Angka Konsumsi Ikan dan Nilai Tukar Nelayan. Angka Konsumsi Ikan masyarakat Kabupaten Pemalang terus meningkat dalam periode 5 tahun terakhir dan telah melebihi target yang direncanakan. Pada tahun 2020 Angka Konsumsi Ikan telah mencapai 34,46 kg per kapita per tahun yang menunjukkan bahwa sumbangan konsumsi ikan terhadap konsumsi pangan hewani masyarakat di Kabupaten Pemalang semakin tinggi.

Kondisi yang berbeda terjadi pada capaian kinerja tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, dimana Nilai Tukar Nelayan yaitu kemampuan tukar barang-barang (produk) perikanan dengan barang dan jasa yang diperlukan nelayan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk perikanan semakin menurun dalam periode 5 tahun terakhir. Penurunan ini menunjukkan nelayan mengalami defisit/penurunan daya belinya, karena kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input produksi dan barang konsumsi rumahtangganya.

Tabel 2.6.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan Nelayan

Tahun	Angka Konsumsi Ikan		Nilai Tukar Nelayan	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2016	24,94	27,96	1,1	1,1
2017	29,60	29,60	0,97	0,97
2018	30,00	30,06	0,81	0,81
2019	31,00	31,01	0,64	0,64
2020	32,00	34,46	0,68	0,68

2.3.5. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan di Kabupaten Pemalang secara umum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya kecuali untuk tahun 2019 dimana pencapaian rasionya hanya 95,42%. Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah ini dibandingkan dengan realisasinya disebabkan sulitnya kapal untuk labuh dan tambah akibat pendangkalan muara serta masih banyaknya hasil perikanan yang tidak dijual melalui TPI. Tidak tercapainya target realisasi Pendapatan Asli Daerah ini merupakan tantangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang ke depan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Tabel 2.7.

Kinerja Pendapatan Asli Daerah di Sektor Perikanan

No	Tahun	Target	Realisasi	Rasio
1	2016			
2	2017	1.600.000.000	1.915.632.068	119,73%
3	2018	2.000.000.000	2.165.717.405	108,29%
5	2019	2.150.000.000	2.051.528.875	95,42%
6	2020	2.000.000.000	2.066.383.809	103,32%

2.3.6. Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan (ditambahkan tabel T-C. 23 & 24 PMDN 86/2017)

2.3.7. Target dan Realisasi Kinerja Pendanaan

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

Dari gambaran pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang maka dapat diidentifikasi potensi tantangan dan peluang yang dihadapi 5 tahun kedepan dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Pemalang. Identifikasi tantangan dan peluang berguna untuk menghasilkan kebijakan dan strategi yang tepat, sebagai berikut :

Tabel 2.10.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

TANTANGAN	PELUANG
PERIKANAN TANGKAP	
1. Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 2. Tingginya tekanan terhadap sumberdaya alam perikanan terutama penangkapan ikan dengan alat tangkap tidak ramah lingkungan 3. Degradasi lingkungan dan penurunan mutu lingkungan perairan umum 4. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelestarian ekosistem perairan umum yang masih kurang 5. Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas perikanan tangkap 6. Kurangnya akses informasi data perikanan dan pelelangan ikan	1. Potensi dan beragamnya komoditas perikanan tangkap untuk mendukung peningkatan produksi 2. Meningkatnya sinergitas antar instansi baik pusat, provinsi maupun daerah dalam mengatasi degradasi lingkungan 3. Kelembagaan nelayan yang semakin berkembang untuk mendukung program penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan 4. Pengembangan pelayanan TPI melalui digitalisasi data TPI 5. Kebijakan dan peraturan pengelolaan wilayah pesisir
PERIKANAN BUDIDAYA	
1. Infrastruktur sarana prasarana perikanan budidaya yang belum memadai 2. Degradasi lingkungan dan penurunan kualitas air untuk kegiatan budidaya 3. Penguasaan teknologi budidaya yang masih rendah dan belum dilaksanakannya Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) 4. Kegagalan panen akibat serangan penyakit dan bencana alam 5. Naiknya biaya produksi tidak sebanding dengan naiknya harga jual 6. Ketersediaan benih ikan yang belum memadai	1. Dukungan kebijakan melalui penetapan kawasan minapolitan 2. Ekstensifikasi lahan budidaya ikan yang terbuka untuk mendukung peningkatan produksi 3. Pengembangan komoditas yang bernilai tinggi 4. Kelembagaan pembudidaya ikan yang semakin berkembang 5. Teknologi budidaya ikan yang semakin berkembang 6. Dukungan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk mengembangkan usaha budidaya ikan 7. Pengembangan minawisata 8. Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Ikan

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi ikan yang aman pangan 2. Belum optimalnya penerapan cara pengolahan ikan yang baik sesuai standar sanitasi dan higienis 3. Kurangnya inovasi pengolahan produk perikanan 4. Sulitnya akses pasar dan promosi produk perikanan	1. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat untuk mendukung program peningkatan konsumsi ikan 2. Kelembagaan pengolah dan pemasar yang semakin berkembang 3. Teknologi dan diversifikasi produk olahan ikan yang semakin berkembang 4. Tingginya permintaan pasar hasil perikanan 5. Tumbuhnya kewirausahaan pengolahan ikan di masyarakat



BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menjadi langkah awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih reliable dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, didasarkan pula pada evaluasi terhadap situasi dan kondisi sektor perikanan di Kabupaten Pemalang, permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026 serta didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan rencana kerja dan rencana strategis periode sebelumnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang antara lain :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
I	PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BELUM OPTIMAL DAN KURANG MERATA		
1	Belum optimalnya produksi perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Pendangkalan muara yang menyebabkan kesulitan keluar masuk kapal perikanan
			Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan
			Degradasi lingkungan dan penurunan mutu lingkungan perairan umum
			Kurangnya kesadaran masyarakat akan pelestarian ekosistem perairan umum
			Belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas perikanan tangkap
			Terbatasnya SDM penyuluh perikanan
		Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Belum memadainya infrastruktur sarana prasarana perikanan budidaya
			Degradasi lingkungan dan penurunan kualitas air untuk budidaya perikanan
			Penguasaan teknologi budidaya perikanan yang masih rendah
			Belum optimalnya pelaksanaan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
			Belum optimalnya penanganan serangan penyakit dan bencana alam
			Naiknya biaya produksi tidak sebanding dengan naiknya harga jual
			Ketersediaan benih ikan yang belum memadai
			Terbatasnya SDM penyuluh perikanan
		Belum optimalnya standarisasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung aktivitas pelelangan ikan
			Masih adanya pemasaran produk tangkapan yang tidak

			melalui TPI
NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Masih rendahnya angka konsumsi ikan	Beragamnya produk pangan sumber protein sebagai produk substitusi ikan
			Kurangnya promosi gemar makan ikan dan promosi produk perikanan
			Kurangnya inovasi pengolahan produk perikanan
		Masih rendahnya unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan	Belum optimalnya penerapan cara pengolahan ikan yang sesuai standar higienis
			Belum optimalnya pembinaan kelompok pengolah dan pemasar

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah ~~terpilih~~ merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah ~~terpilih~~ menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ~~terpilih~~ ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang, visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI"

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut :
Adil, Keadaaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor,

pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur, Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis, Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni, Kondisi Kabupaten Pemalang yang adil makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang dominan terdapat dalam **Misi ke lima** yaitu :

“Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal”

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta

dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan : DEWI = Desa Wisata , KOIN= Kota Industri).

Dari Misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Misi 5 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal	Meningkatnya produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal	Pengelolaan perikanan tangkap	1. Terjadinya pendangkalan muara sehingga menyulitkan tambat labuh kapal 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Tempat Pelelangan Ikan 3. Terbatasnya SDM penyuluh perikanan tangkap	1. Potensi komoditas perikanan tangkap yang cukup besar dan beragam 2. Dukungan anggaran peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur perikanan tangkap 3. Dukungan CSR dari BUMN/BUMD maupun swasta 4. Penambahan jumlah penyuluh perikanan tangkap
			Pengelolaan perikanan budidaya	1. Belum memadainya infrastruktur perikanan budidaya (saluran tambak dan jalan usaha tani) 2. Penguasaan teknologi budidaya perikanan yang masih rendah 3. Belum optimalnya pelaksanaan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) 4. Belum optimalnya penanganan serangan hama dan penyakit pada budidaya perikanan	1. Potensi pengembangan lahan budidaya perikanan yang cukup besar 2. Potensi iklim, lahan dan air untuk mendukung pengembangan usaha perbenihan ikan 3. Dukungan anggaran peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur perikanan budidaya 4. Perkembangan teknologi budidaya ikan yang dapat meningkatkan produktivitas

NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
				5. Tata niaga dan harga komoditas yang belum menguntungkan pembudidaya 5. Belum tumbuhnya sistem agribisnis hulu khususnya usaha pembenihan ikan 6. Terbatasnya SDM penyuluh perikanan budidaya	5. Penambahan jumlah penyuluh perikanan budidaya
			Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	1. Penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan 2. Degradasi lingkungan dan penurunan mutu lingkungan perairan umum 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pelestarian ekosistem perairan umum	1. Pemberian bantuan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan 2. Sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam mengatasi degradasi lingkungan
			Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1. Beragamnya produk pangan sumber protein sebagai produk substitusi ikan 2. Kurangnya promosi gemar makan ikan dan promosi produk perikanan 3. Kurangnya inovasi pengolahan produk perikanan 4. Belum optimalnya penerapan cara pengolahan ikan yang sesuai standar kesehatan 5. Belum optimalnya pembinaan kelompok pengolah dan pemasar	1. Meningkatnya daya beli masyarakat untuk mendukung konsumsi ikan 2. Berkembangnya kelompok masyarakat pengolah dan pemasar ikan 3. Sinergitas antara pemerintah daerah provinsi dan pusat dalam penetapan standarisasi produk olahan ikan

3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi dari Kementerian Kelautan Perikanan adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dalam mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni :
 - a. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
 - b. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni :
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
 - b. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
 - c. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
3. Kesejahteraan/Kesejahteraan (Prosperity), yakni :
 - a. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/ impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan “Kesejahteraan” dan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut:

1. Stakeholders Prespective Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”
2. Customer Perspective Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”

3. Internal Process Perspective Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni :
 - a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”
 - b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”
 - c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”
4. Learning and Growth Perspective (input) Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :
 - a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”

- b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”
- c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”
- d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang, program pemerintah Pusat yang direncanakan di wilayah Kabupaten Pemalang adalah :

1. Arsitektur Kampung Ikan Mojo yang merupakan model pengembangan ekonomi desa yang berbasis perikanan
2. Klaster vannamae Pesantren yang merupakan ekstensifikasi pengembangan lahan budidaya udang vannamae.
3. Pembangunan Dermaga Asem Doyong
4. Bantuan alat tangkap ramah lingkungan

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Pelayanan : “Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Sub Sektor Perikanan” dengan indikator tujuan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%).
2. Berkaitan dengan kesekretariatan : “Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan” dengan indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat (angka).

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, indikator sasaran : produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan produksi garam (ton/tahun), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi);

2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan indikator sasaran : Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di sektor perikanan (%);
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran : Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)

Strategi yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
2. Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif;
3. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor;
4. Peningkatan produksi garam yang berkualitas, terintegrasi, dan berteknologi;
5. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik.

Sebagai tindak lanjut dari 6 (enam) strategi yang ditetapkanlah arah kebijakan yang lebih bersifat operasional yang diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini. Arah kebijakan yang akan diambil dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui :
 - a) Pembiayaan premi asuransi nelayan
 - b) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap

- c) Pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil
 - d) Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
 - e) Pengembangan kartu nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi terpadu
2. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon
3. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui :
- a) Peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB)
 - b) Intensifikasi budidaya ikan air payau dan laut
 - c) Pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal
 - d) Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan
 - e) Penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya
 - f) Pengembangan kawasan nila salin dan mina padi
4. Pengembangan produk benih dan induk unggul tahan penyakit melalui :
- a) Pengembangan Broodstock Center
 - b) Pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif
5. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui :
- a) Pemenuhan kebutuhan bahan baku;
 - b) Peningkatan konsumsi ikan
 - c) Peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien
6. Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam
7. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir

8. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tabel 3.3.

**Matrik Komparasi Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

No	Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Sasaran Pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	1. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
2	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan	4. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Periode 2018-2038, disebutkan bahwa penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan pola ruang wilayah yang serasi dan seimbang dalam upaya pemanfaatannya, baik untuk ruang kawasan lindung maupun ruang untuk kawasan budidaya sehingga dalam pengembangannya dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal sesuai dengan potensi dan kendala yang ada. Kegiatan perikanan sangat erat kaitannya dengan peruntukan ruang baik itu dari segi struktur maupun pola ruang kawasan.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh

pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS dilaksanakan/ dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, karena pada prinsipnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun evaluasi. KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap pembangunan perikanan di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Rencana Pola Ruang	Arahan Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
1	Kawasan hutan lindung	Luas 5.395 ha meliputi : 1. Kecamatan Bantarbolang 2. Kecamatan Belik 3. Kecamatan Moga 4. Kecamatan Pulosari 5. Kecamatan Watukumpul	Perlindungan ekosistem perikanan	Peningkatan mutu lingkungan perairan umum
2	Kawasan perlindungan setempat	1. Sempadan pantai 2. Sempadan sungai 3. Sempadan saluran irigasi 4. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	Perlindungan ekosistem perikanan	Peningkatan mutu lingkungan perairan umum
3	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam	Cagar Alam : 1. CA Bantarbolang 2. CA Moga 3. CA Curug Bengkawah	Perlindungan ekosistem perikanan	Peningkatan mutu lingkungan perairan umum
4	Kawasan Peruntukan Perikanan	1. Budidaya tambak 2. Budidaya air tawar 3. Fasilitas perikanan tangkap 4. Pengolahan perikanan	1. Kawasan strategis minapolitan PETAIKAN	1. Kegiatan budidaya perikanan tambak 2. Kegiatan budidaya perikanan air tawar 3. Pembangunan dan pengembangan fasilitas perikanan tangkap 4. Kegiatan usaha pengolahan ikan

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang; telaah visi, misi dan program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang; telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan telaah RTRW Kabupaten Pemalang dan KLHS maka berikut ini adalah isu-isu strategis yang dapat ditindaklanjuti Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dengan penyusunan Program dan Kegiatan termasuk target capaian masing-masing indikatornya selama lima tahun, yaitu :

1. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap.
2. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya
3. Belum optimalnya standarisasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
4. Masih rendahnya Angka Konsumsi Ikan
5. Masih rendahnya unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang merupakan tindak lanjut dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten pemalang terkait dengan pencapaian misi kelima yaitu **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Pada Potensi Lokal**. Dari misi tersebut tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dalam kemandirian ekonomi daerah dan sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal.

Tujuan dan sasaran dari RPJMD terkait misi kelima tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa tujuan dan sasaran di tingkat Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini yaitu :

- 1) Meningkatnya nilai tambah sektor perikanan
- 2) Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan

Dari tujuan dan sasaran tersebut, indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang untuk Urusan Kelautan dan Perikanan dalam 5 Tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan produksi dan produktivitas serta nilai ekonomi berbasis potensi lokal	Persentase produksi dan produktivitas sektor perikanan dalam PDRB			%	3,35	3,29	3,27	3,24	3,21	3,17	3,13
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Kg	18.096.881	17.194.460	18.012.563	18.372.814	18.740.270	19.115.075	19.497.377
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Kg	17.800.168	18.652.000	19.211.600	19.787.900	20.381.500	20.993.000	21.622.790
		Peningkatan produksi hasil olahan perikanan	Jumlah produksi hasil olahan perikanan	Kg	11.360.484	11.587.694	11.819.448	12.055.837	12.296.953	12.542.892	12.793.750

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni dan meralisasikan misi kelima dari RPJMD yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Pada Potensi Lokal. Dengan demikian strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien.

Perumusan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang didasarkan pada kriteria:

1. Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
3. Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam pemilihan strategi dan kebijakan urusan kelautan dan perikanan adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal dengan didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Tabel 5.1.
Analisis SWOT

ISU STRATEGIS	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Potensi dan beragamnya komoditas perikanan untuk mendukung peningkatan produksi 2. Dukungan kebijakan melalui penetapan kawasan minapolitan 3. Sinergitas antar instansi baik pusat maupun daerah dalam mengatasi degradasi lingkungan 4. Pengembangan Unit Budidaya Ikan Air Tawar	1. Sarana dan prasarana tempat pendaratan ikan dan Tempat Pelelangan Ikan belum memadai 2. Penguasaan teknologi budidaya yang masih rendah dan belum dilaksanakannya Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) 3. Terbatasnya SDM penyuluh perikanan
PELUANG (OPPORTUNITY)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
1. Kelembagaan nelayan dan pembudidaya yang semakin berkembang 2. Ekstensifikasi lahan budidaya ikan yang terbuka untuk mendukung peningkatan produksi 2. Teknologi budidaya ikan dan pengolahan ikan yang semakin berkembang 3. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat untuk mendukung program peningkatan konsumsi ikan 4. Tingginya permintaan pasar hasil perikanan	1. Peningkatan produksi perikanan tangkap 2. Peningkatan produksi perikanan budidaya 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas olahan hasil perikanan	
TANTANGAN (THREAT)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Tingginya tekanan terhadap sumberdaya perikanan dan degradasi lingkungan 2. Inovasi pengolahan produk perikanan 3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian ekosistem perairan umum 4. Masih adanya pemasaran produk tangkapan yang tidak melalui TPI 5. Tata niaga dan harga komoditas yang belum berpihak pada pembudidaya 6. Sistem agribisnis hulu (perbenihan ikan) yang belum tumbuh	1. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI			
Misi : Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal	Meningkatnya nilai tambah sektor perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Identifikasi dan inventarisasi sumberdaya dan potensi perikanan tangkap
			Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perikanan tangkap
			Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan tangkap
			Peningkatan kompetensi pelaku usaha perikanan tangkap
			Peningkatan layanan usaha perikanan tangkap
		Peningkatan produksi perikanan budidaya	Identifikasi dan inventarisasi sumberdaya dan potensi perikanan budidaya
			Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perikanan budidaya
			Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan budidaya
			Peningkatan kompetensi pelaku usaha perikanan budidaya
			Peningkatan layanan usaha perikanan budidaya
		Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Koordinasi, Sinergi dan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengatasi degradasi lingkungan
			Sosialisasi dan pembinaan masyarakat terhadap kelestarian ekosistem perairan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas olahan hasil perikanan	Peningkatan kompetensi pelaku usaha olahan hasil perikanan
			Fasilitasi sertifikasi dan izin usaha olahan hasil perikanan
			Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
			Peningkatan kualitas produksi dan akses pasar hasil olahan perikanan



BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang telah menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026. Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pemalang yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang untuk urusan pilihan kelautan dan perikanan.

Program prioritas yang ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan Kegiatan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diudahkan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota
 - c) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

- d) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - a) Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil
 - b) Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Pengelolaan pembudidaya ikan
- 3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - a) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - a) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - b) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - c) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Rencana Program, dan Kegiatan di Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penan ggung Jawa b	Lok asi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatk an total produksi perikanan tangkap dan budidaya	Meningkat nya total produksi perikanan tangkap dan budidaya		Program pengelolaa n perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3,64%	2%	2.004,501	2%	2.004,501	2%	2.004,501	2%	2.004,501	2%	2.004,501	2%	2.004,501		
			Kegiatan pengelolaa n penangkap an ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah Kab/Kota	Persentase TPI yang tertangani	100%	100%	1.404,501	100%	1.404,501	100%	1.404,501	100%	1.404,501	100%	1.404,501	100%	1.404,501		
				Jumlah data dan informasi SDI yang terupdate	2	2	70,000	2	70,000	2	70,000	2	70,000	2	70,000	2	70,000		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penang ggung Jawa b	Lok asi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah fasilitas TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik	5	5	1.334,501	5	1.334,501	5	1.334,501	5	1.334,501	5	1.334,501	5	1.334,501		
			Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kab/Kota	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana	2	2	425,000	2	425,000	2	425,000	2	425,000	2	425,000	2	425,000		
				Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan	7	7	225,000	8	225,000	8	225,000	8	225,000	8	225,000	8	225,000		
				Jumlah kegiatan hari nusantara yang terlaksana	1	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000		
			Kegiatan proseduran dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah prosedur tetap dan pembinaan masyarakat dalam penyelenggaraan TPI		2 Kegiatan (Protap dan Pembinaan)	1.099,000	2 Kegiatan (Protap dan Pembinaan)	1.099,000	2 Kegiatan (Protap dan Pembinaan)	1.099,000	2 Kegiatan (Protap dan Pembinaan)	1.099,000	2 Kegiatan (Protap dan Pembinaan)	1.099,000	2 Kegiatan (Protap dan Pembinaan)	1.099,000		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penan ggung Jawa b	Lok asi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah pelaku perikanan yang terupdate, jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara (Jumlah pemutahiran pelaku perikanan)	5 TPI dan 1 UPI	3 Kali, 12 Bulan	549,800	3 Kali, 12 Bulan	549,800	3 Kali, 12 Bulan	549,800	3 Kali, 12 Bulan	549,800	3 Kali, 12 Bulan	549,800	3 Kali, 12 Bulan	549,800		
				Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI (Karyawan, nelayan, bakul)		15	549,200	15	549,200	15	549,200	15	549,200	15	549,200	15	549,200		
			Kegiatan penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah Kab/kota	Jumlah jenis pelayanan perizinan dokumen kapal	2	2	175,000	2	175,000	2	175,000	2	175,000	2	175,000	2	175,000		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah pendataan kapal dan pelayanan yang dilaksanakan	6	6	175,000	6	175,000	6	175,000	6	175,000	6	175,000	6	175,000		
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	5,63%	3%	3.376,496	3%	3.466,496	3%	3.431,496	3%	3.431,496	3%	3.481,496	3%	3.481,496		
			Kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang dibina	105 Orang	105 Orang	602,200	140 Orang	602,200	175 Orang	602,200	210 Orang	602,200	240 Orang	602,200	280 Orang	602,200		
				Jumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan	8	8	89,600	8	89,600	8	89,600	8	89,600	8	89,600	8	89,600		
				Jumlah pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi badan hukum bagi POKDAKAN	3	3	33,000	3	33,000	3	33,000	3	33,000	3	33,000	3	33,000		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah pendampingan pada kelompok penerima bantuan, sosialisasi, dan fasilitasi program bantuan bagi pembudidaya ikan yang dilaksanakan	1 Kegiatan 8 Kelompok	3	50,500	3	50,500	3	50,500	3	50,500	3	50,500	3	50,500		
				Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang dilaksanakan	105 Peserta Pelatihan, 6 Paket percontohan budidaya	5 Kelompok, 350 peserta pelatihan, 1 Kegiatan	429,100	5 Kelompok, 350 peserta pelatihan, 1 Kegiatan	429,100	5 Kelompok, 350 peserta pelatihan, 1 Kegiatan	429,100	5 Kelompok, 350 peserta pelatihan, 1 Kegiatan	429,100	5 Kelompok, 350 peserta pelatihan, 1 Kegiatan	429,100	5 Kelompok, 350 peserta pelatihan, 1 Kegiatan	429,100		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penan ggung Jawa b	Lok asi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 Daerah Kab/Kota						25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		
				Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi persyaratan untuk penetapan TDPIK				100 Orang	25,000	100 Orang	25,000	100 Orang	25,000	100 Orang	25,000	100 Orang	25,000		
			Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidayaan ikan	3	3	2.774,296	3	2.839,296	3	2.804,296	3	2.804,296	3	2.849,296	3	2.854,296		
				Jumlah data luasan lahan yang tersedia, jumlah data produksi yang tersedia	1	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah pengembangan Jalan Produksi Desa Mojo (3), Lawangrejo, Danasari Kunjungan Lapangan (Jawa Timur) Normalisasi Saluran Tambak Desa Pesantren dan Mojo (DAK) Pengembangan Jalan dan Jembatan Produksi Desa Ketapang, Desa Blendung, Desa Pesantren, Desa Mojo, Desa Kendalrejo(DAK) Rehab TPHT Desa Pesantren, Krantil (Pesantren), Limbangan	11	13	2.087,246	13	2.087,246	13	2.087,246	13	2.087,246	13	2.087,246	13	2.087,246		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penan ggung Jawa b	Lok asi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Jenis 5 Kegiatan	100,000	5 Kegiatan	100,000	6 Kegiatan	100,000	7 Kegiatan	100,000	8 Kegiatan	100,000	9 Kegiatan	100,000		
				Jumlah alat perekayasa oksigen untuk produksi budidaya yang tersedia, jumlah alat pompa air dan perangkatnya yang tersedia, jumlah induk ikan unttgul yang tersedia, jumlah pakan buatan dan pakan alami yang tersedia		3 Unit, 1 Paket 1 Kegiatan , 1 Paket	497,050	Pembinaan 170, 3 paket sarana produksi benih dan 3 rehab sarana prasarana	497,050	Pembinaan 170, 3 paket sarana produksi benih dan 3 rehab sarana prasarana	497,050	Pembinaan 170, 3 paket sarana produksi benih dan 3 rehab sarana prasarana	497,050	Pembinaan 170, 3 paket sarana produksi benih dan 3 rehab sarana prasarana	497,050	Pembinaan 170, 3 paket sarana produksi benih dan 3 rehab sarana prasarana	497,050		
				Pembinaan dan monitoring kegiatan	4			2 Kegiatan	30,000	2 Kegiatan	30,000	2 Kegiatan	30,000	2 Kegiatan	35,000	2 Kegiatan	40,000		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penan ggung Jawa b	Lok asi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Survey potensi daya dukung lahan dan percontohan budidaya ramah lingkungan	1 Pokdakan budidaya ramah lingkungan	2	50,000	2	50,000	2	50,000	2	50,000	2	50,000	2	50,000		
				Survey inventarisasi dan perencanaan pengembang an jaringan irigasi tambak				1 Dokumen	35,000	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	40,000	1 Dokumen	40,000		
			Program pengawasa n sumberday a kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan pengawasa n PUD	4	4	194,350	4	194,350	4	194,350	4	194,350	4	194,350	4	194,350		
			Kegiatan Pengawasa n Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahaka n Dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah peraturan-peraturan pengelolaan perikanan yang terbentuk	1 Dokumen	1 Dokumen	194,350	1 Dokumen	194,350	1 Dokumen	194,350	1 Dokumen	194,350	1 Dokumen	194,350	1 Dokumen	194,350		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penan ggung Jawa b	Lok asi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah penyusunan Perda tentang pengelolaan perikanan yang tersusun	1 Paket 1.500 batang cemara laut	1 Dokumen	194,350	2 Kegiatan/so sialisasi	194,350	3 Kegiatan/so sialisasi	194,350	4 Kegiatan/so sialisasi	194,350	5 Kegiatan/so sialisasi	194,350	6 Kegiatan/so sialisasi	194,350		
Peningkata n Angka Konsumsi Ikan	Meningkat nya Angka Konsumsi Ikan		Program pengolaha n dan pemasaran hasil perikanan	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan	48,87	5	1.345,300	5	1.345,300	5	1.345,300	5	1.345,300	5	1.345,300	5	1.345,300		
			Kegiatan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolaha n Hasil Perikanan Bagi Usaha Skla Mikro dan Kecil	Jumlah data dan informasi Poklahsar	3	3	328,450	3	328,450	3	328,450	3	328,450	3		328,450	328,450		
				Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat halal bagi poklahsar yang dilaksanakan	10 Poklahsar 3 Kegiatan	150 sampel, 11 kelompok	328,450	20 lokasi 15 Poklahsar	328,450	20 lokasi 17 Poklahsar	328,450	20 lokasi 23 Poklahsar	328,450	20 lokasi 23 Poklahsar	328,450	20 lokasi 55 Poklahsar	328,450		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penan ggung Jawa b	Lok asi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolaha n dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi Poklahsar yang terlaksana	1	1	301,200	1	301,200	1	301,200	1	301,200	1	301,200	1	301,200		
				Jumlah Poklahsar yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	6	6	301,200	6	301,200	6	301,200	6	301,200	6	301,200	6	301,200		
			Kegiatan Penyediaa n dan penyaluran bahan baku industri pengloaha n ikan dalam 1 daerah Kab/Kota	Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	3	3	715,560	3	715,560	3	715,560	3	715,560	3	715,560	3	715,560		
				Jumlah safari gemar makan ikan dan lomba masak ikan yang terselenggar a	300 Orang	2	357,802	2	357,802	2	357,802	2	357,802	2	357,802	2	357,802		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penan ggung Jawa b	Lok asi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah pameran lokal, regional dan nasional yang diikuti	4	6	357,848	6	357,848	6	357,848	6	357,848	6	357,848	6	357,848		
			Program penunjang urusan pemerintahan an daetrah Kab/Kota	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah															
			Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah															
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	3 Dokumen	133,250	3 Dokumen	133,250	3 Dokumen	133,250	3 Dokumen	133,250	3 Dokumen	133,250	3 Dokumen	133,250		
				Jumlah mustrenbang perikanan yang dilaksanakan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan			
				Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10,450	1 Dokumen	10,450	1 Dokumen	10,450	1 Dokumen	10,450	1 Dokumen	10,450	1 Dokumen	10,450		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	10,113	1 Dokumen	10,113	1 Dokumen	10,113	1 Dokumen	10,113	1 Dokumen	10,113	1 Dokumen	10,113		
				Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	11,685	1 Dokumen	11,685	1 Dokumen	11,685	1 Dokumen	11,685	1 Dokumen	11,685	1 Dokumen	11,685		
				Jumlah dokumen perubahan DPA-SKDP yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	10,150	1 Dokumen	10,150	1 Dokumen	10,150	1 Dokumen	10,150	1 Dokumen	10,150	1 Dokumen	10,150		
				Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000	2 Dokumen	10,000	2 Dokumen	10,000	2 Dokumen	10,000	2 Dokumen	10,000	2 Dokumen	10,000		
				Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun															
			Kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	38 Orang 14 Bulan	38 Orang 14 Bulan	5.029,378	38 Orang 14 Bulan	5.029,378	38 Orang 14 Bulan	5.029,378	38 Orang 14 Bulan	5.029,378	38 Orang 14 Bulan	5.029,378	38 Orang 14 Bulan	5.029,378		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah honor pengelolaan keuangan daerah yang difasilitasi		23 Orang 12 Bulan	387,120	23 Orang 12 Bulan	387,120	23 Orang 12 Bulan	387,120	23 Orang 12 Bulan	387,120	23 Orang 12 Bulan	387,120	23 Orang 12 Bulan	387,120		
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 Laporan	5 Dokumen	7,400	5 Dokumen	7,400	5 Dokumen	7,400	5 Dokumen	7,400	5 Dokumen	7,400	5 Dokumen	7,400		
				Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	3,023	2 Laporan	3,023	2 Laporan	3,023	2 Laporan	3,023	2 Laporan	3,023	2 Laporan	3,023		
			Kegiatan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah															
				Jumlah pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	0 Kali	12 Kali	10,000	12 Kali	10,000	12 Kali	10,000	12 Kali	10,000	12 Kali	10,000	12 Kali	10,000		
			Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah															

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000		
			Kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah															
				Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	0	12 Kali	16,000	12 Kali	16,000	12 Kali	16,000	12 Kali	16,000	12 Kali	16,000	12 Kali	16,000		
				Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	0	2 Kegiatan 110 Orang	197,674	2 Kegiatan 110 Orang	197,674	2 Kegiatan 110 Orang	197,674	2 Kegiatan 110 Orang	197,674	2 Kegiatan 110 Orang	197,674	2 Kegiatan 110 Orang	197,674		
			Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah															
				Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/ penenrangan bangunan kantor yang dibeli	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	24,997	1 Paket 12 Bulan	24,997	1 Paket 12 Bulan	24,997	1 Paket 12 Bulan	24,997	1 Paket 12 Bulan	24,997	1 Paket 12 Bulan	24,997		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	5 Jenis	8,434	5 Jenis	8,434	5 Jenis	8,434	5 Jenis	8,434	5 Jenis	8,434	5 Jenis	8,434		
				Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	149,342	1 Paket 12 Bulan	149,342	1 Paket 12 Bulan	149,342	1 Paket 12 Bulan	149,342	1 Paket 12 Bulan	149,342	1 Paket 12 Bulan	149,342		
				Jenis dan jumlah makan dan minuman yang dibeli	3 Jenis 12 Bulan	3 Jenis 12 Bulan		3 Jenis 12 Bulan		3 Jenis 12 Bulan		3 Jenis 12 Bulan		3 Jenis 12 Bulan		3 Jenis 12 Bulan			
				Jenis dan jumlah peralatan dan bahan pembersih yang dibeli	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan		1 Paket 12 Bulan		1 Paket 12 Bulan		1 Paket 12 Bulan		1 Paket 12 Bulan		1 Paket 12 Bulan			
				Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	262,575	1 Paket 12 Bulan	262,575	1 Paket 12 Bulan	262,575	1 Paket 12 Bulan	262,575	1 Paket 12 Bulan	262,575	1 Paket 12 Bulan	262,575		
				Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	1 Jenis 12 Bulan	1 Jenis 12 Bulan	12,695	1 Jenis 12 Bulan	12,695	1 Jenis 12 Bulan	12,695	1 Jenis 12 Bulan	12,695	1 Jenis 12 Bulan	12,695	1 Jenis 12 Bulan	12,695		
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	12 Bulan	240 Kali 12 Bulan	352,965	240 Kali 12 Bulan	352,965	240 Kali 12 Bulan	352,965	240 Kali 12 Bulan	352,965	240 Kali 12 Bulan	352,965	240 Kali 12 Bulan	352,965		
			Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis			

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jenis dan jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibeli	0	1 Jenis	33,815	1 Jenis	33,815	1 Jenis	33,815	1 Jenis	33,815	1 Jenis	33,815	1 Jenis	33,815		
				Jumlah mebeleur yang dibeli	4 Jenis	2 set	11,226	2 set	11,226	2 set	11,226	2 set	11,226	2 set	11,226	2 set	11,226		
				Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	2 Jenis	17 Buah	103,727	17 Buah	103,727	17 Buah	103,727	17 Buah	103,727	17 Buah	103,727	17 Buah	103,727		
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	1 Paket	1 set	6,000	1 set	6,000	1 set	6,000	1 set	6,000	1 set	6,000	1 set	6,000		
			Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis			
				Jumlah surat terkirim		500 Surat	9,300	500 Surat	9,300	500 Surat	9,300	500 Surat	9,300	500 Surat	9,300	500 Surat	9,300		
				Rekening jasa sumbserdaya yang dibayar setiap bulan	4 Rekening 12 Bulan	4 Rekening 12 Bulan	122,400	4 Rekening 12 Bulan	122,400	4 Rekening 12 Bulan	122,400	4 Rekening 12 Bulan	122,400	4 Rekening 12 Bulan	122,400	4 Rekening 12 Bulan	122,400		
				Jumlah SDM Non PNS setiap bulan		25 Orang, 9 Orang, 2 Jenis	632,080	25 Orang, 9 Orang, 2 Jenis	632,080	25 Orang, 9 Orang, 2 Jenis	632,080	25 Orang, 9 Orang, 2 Jenis	632,080	25 Orang, 9 Orang, 2 Jenis	632,080	25 Orang, 9 Orang, 2 Jenis	632,080		

Rencana Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah		3 Jenis	294,180	3 Jenis	294,180	3 Jenis	294,180	3 Jenis	294,180	3 Jenis	294,180	3 Jenis	294,180		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	54 Kendaraan	54 Kendaraan	75,385	54 Kendaraan	75,385	54 Kendaraan	75,385	54 Kendaraan	75,385	54 Kendaraan	75,385	54 Kendaraan	75,385		
				Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	25 Unit	25 Unit	47,580	25 Unit	47,580	25 Unit	47,580	25 Unit	47,580	25 Unit	47,580	25 Unit	47,580		
				Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	3 Gedung	2 Gedung	171,215	2 Gedung	171,215	2 Gedung	171,215	2 Gedung	171,215	2 Gedung	171,215	2 Gedung	171,215		
			Kegiatan Penataan Organisasi				30,500		30,500		30,500		30,500		30,500		30,500		
				Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun	0	4 Laporan	14,500	4 Laporan	14,500	4 Laporan	14,500	4 Laporan	14,500	4 Laporan	14,500	4 Laporan	14,500		
				Jumlah monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana yang terlaksana	0	12 Kali	16,000	12 Kali	16,000	12 Kali	16,000	12 Kali	16,000	12 Kali	16,000	12 Kali	16,000		



BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penetapan indikator kinerja pelayanan bidang urusan kelautan dan perikanan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang selama lima tahun ke depan. Berdasarkan tabel di bawah ini Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang mendukung indikator sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang yaitu

1. Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya selama lima tahun ke depan diperkirakan akan terus meningkat dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebesar 41.120.167 kg.
2. Angka konsumsi ikan selama lima tahun ke depan diperkirakan akan terus meningkat dengan dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebesar 36 kg/kapita/tahun.

Indikator kinerja tersebut dapat dicapai bila sumber daya organisasi dan asumsi–asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Berikut Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya	Kg	35.897.049	35.846.460	37.241.163	38.160.714	39.121.770	21.214.375	41.120.167
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	34,46	33,50	34,00	34,50	35,00	35,50	36,00
3	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)								
4	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional								
5	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan								
6	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)								
7	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi								



PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan kelautan dan perikanan yang diampu oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang untuk periode 5 tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan kelautan dan perikanan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi daerah Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Pemalang dan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang.

Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan kelautan dan perikanan dan atau target kinerja sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.

Pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang harus ditingkatkan. Hasil dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove)

pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang ini.

Pemalang,

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG**

SUHARTO, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620427 198603 1 010